

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Pada Usaha Jasa *Laundry* Di Sekitar Kampus UIN RIL)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Disusun oleh:

**Irma Asmah Mawadati**

**Npm: 1521020222**

**Jurusan: Hukum Tata Negara**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1441 H/2019 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

(Studi Pada Usaha Jasa *Laundry* Di Sekitar Kampus UIN RIL)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**



Disusun oleh:

**Irma Asmah Mawadati**

**Npm: 1521020222**

**Jurusan: Hukum Tata Negara**

**Pembimbing I  
Pembimbing II**

**: Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**: Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
TAHUN 1441 H/2019 M**

## ABSTRAK

Di sekitar kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung terdapat beberapa usaha jasa *laundry*, dalam usaha *laundry* tersebut banyak konsumen yang komplain yang disebabkan karena pakaian yang mereka cuci hilang atau tertukarnya pakaian dengan konsumen lain, kelunturan, kurang rapi dalam penyetrikaan dan kurang tepat waktu dalam menyelesaikan pencucian pakaian, sedangkan pemilik usaha ada yang mengganti ada juga yang tidak, sehingga konsumen kurang nyaman dengan pelayanan itu dan hal ini juga merugikan pihak konsumen. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan konsumen. Islam mengatur dalam supaya pemilik usaha harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu hal ini menarik untuk diteliti dengan rumusan masalah yaitu 1). Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa laundry disekitar kampus UIN RIL. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa laundry di sekitar kampus UIN RIL. Maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa laundry disekitar kampus UIN RIL. 2). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa laundry di sekitar kampus UIN RIL. Untuk penelitian usaha jasa *laundry* ini memerlukan beberapa tahapan dalam teknik pengumpulan data di antaranya observasi ke tempat usaha jasa *laundry*, wawancara kepada pemilik usaha serta dokumentasi berupa foto tempat usaha dan pemilik usaha jasa *laundry* dan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Jumlah *laundry* yang ada di sekitar kampus radius 500 meter terdapat 10 *laundry* dan metode penelitian yang digunakan yaitu metode sampel serta penelitian ini dilakukan sejak bulan Agustus sampai dengan awal september 2019. Hasil penelitian terhadap usaha jasa *laundry* ini menunjukkan bahwa bentuk tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* di dalam menjalankan usahanya sangat bervariasi dan salah satu bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh para pelaku usaha jasa *laundry* yaitu mengganti pakaian yang hilang dan ada juga yang menggantinya dengan gratis 10 kali pencucian serta mencarikan pakaian atau barang milik konsumen yang tertukar dengan konsumen lain. Dalam hal ini tinjauan hukum Islam terhadap implementasi perlindungan konsumen bahwasanya tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry*, dalam hal ini pihak *laundry* jika ada pakaian milik konsumen yang hilang atau rusak maka pihak *laundry* wajib mengganti pakaian tersebut.



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

---

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703289*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irma Asmah Mawadati  
NPM : 1521020222  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen** (Studi Pada Usaha Jasa *Laundry* di Sekitar Kampus UIN RIL” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 November 2019

Penulis,

Irma Asmah Mawadati  
NPM. 1521020222





**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Telp (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Usaha Jasa Laundry di Sekitar Kampus UIN RIL**

**Nama : Irma Asmah Mawadati**

**NPM : 1521020222**

**Jurusan : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP. 197111061998032005**

**Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197308162003122003**

**Ketua Jurusan,**

**Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.**

**NIP. 197111061998032005**





Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarama Bandar Lampung, Telp (0721) 703289

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Usaha Jasa Laundry di Sekitar Kampus UIN RIL)”** disusun oleh **Irma Asmah Mawadati**, NPM. **1521020222**, Program studi **Hukum Tata Negara**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan** pada Hari/Tanggal : **Selasa, 12 November 2019**.

### Tim Penguji

Ketua : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Erik R Gumiri, M.H.

Penguji Utama : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

**Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

Mengetahui  
Toko Fakultas Syari'ah

Dr. H. Haidan Jin, M.H.  
NIP: 195216221993031002



## MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(QS. Al-Mudatstsir: 38)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an Dan Terjemahan Azzahra. Qs. Al-Mudatstsir:38 (Bandung:Syamil Al-Qur'an)

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT dan rasa syukur yang tak terkira dan sebagai ungkapan terimakasihku persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahandaku Slamet Daroini dan Ibundaku Khusnul Khamidah tercinta, doa tulus dan ucapan terimakasih selalu ku persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik, memberikan bekal berupa moral dan material serta membesarkanku dengan penuh kasih sayang sehingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk kakakku Sigit Hariyanto dan adikku Sukma Azahra yang selalu memberikan semangat dan dukungannya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis dengan nama lengkap Irma Asmah Mawadati dilahirkan di Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 12 Februari 1997. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Slamet Daroini dan Ibu Khusnul Khamidah.

Penulis menyelesaikan pendidikan:

1. Taman Kanak-Kanak ABA Tanjung Intan diselesaikan tahun 2003
2. SD Negeri 1 Tanjung Intan diselesaikan tahun 2009.
3. SMP Negeri 1 Purbolinggo diselesaikan tahun 2012.
4. SMA Negeri 1 Purbolinggo jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2015.
5. Tahun 2015, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah pada program Studi Siyasa (Hukum Tata Negara).

## KATA PENGANTAR

Rasa puji dan syukur yang tak terhingga kepada Dzat Yang Maha Agung, penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala karunia dan nikmat-Nya, kesehatan jasmani dan rohani, serta kekuatan lahir batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN “**

Sebagai syarat akhir untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat teriring salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Selaku manusia biasa, penulis adalah tempat salah dan dosa karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Hanya dengan kesungguhan maksimal, kita dapat mendekati dari sebuah kesempurnaan, Aamiin.

Kepada semua pihak, penulis sampaikan terima kasih karena berkat dorongan moral, semangat dan ilmunya yang telah mendukung sehingga dapat



terselesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Moh. Mukri,. M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu. Dr. Hj.Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. dan Bapak. Franki, M.Si. Selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Siyasa yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu. Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan perhatian, bimbingan, arahan dan masukan yang berarti selama proses penulisan ini.
5. Ibu. Eti Karini, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Fakultas Syari'ah serta Bapak dan Ibu Dosen, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang dengan penuh pengabdian telah mamberikan Ilmu pengetahuan pada penulis selam dibangku kuliah.
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pengelolaan Perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Sahabatku Devi Apriani, Khusnul Zannah, Istikhorotus Sholikhah, Meri Kurniati, Elli Setiwati, Putri Bima Cipta, Tika Ardiyani yang telah membantu dan selalu ada disaat saya membutuhkan.

9. Keluarga KKN 80 terimakasih atas semangatnya dan kekompakannya serta terimakasih sudah untuk waktu 30 harinya.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini khususnya untuk teman-teman angkatan 2015 jurusan Siyash terutama kelas C yang saya sayangi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun, penulis berterimakasih dengan senang hati.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini, dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

**Wasalamualaikum Wr. Wb.**

Bandar Lampung, 14 November 2019

**Penulis.**

**Irma Asmah Mawadati**  
**NPM. 1521020222**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Signifikasi Penelitian .....	6
H. Metode Penelitian .....	7

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Pelaku Menurut Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 .....	12
1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	12
2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pengusaha dalam Dunia Usaha .....	17
3. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen.....	23
4. Unsur-Unsur dijatuhkannya Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen.....	32
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Hukum Islam .....	33
1. Pengertian Pelaku Usaha .....	33
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha .....	35
3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	38
4. Konsumen dan Perlindungan Konsumen .....	39
5. Hak dan kewajiban konsumen.....	42
6. Tanggung jawab Negara dalam Implementasi peraturan perUndang-Undangan .....	48
C. Tinjauan Pustaka.....	57

### **BAB III LAPORAN PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..... 60
- B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry Di Sekitar UIN RIL ..... 64

### **BAB IV ANALISIS**

- A. Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada usaha jasa *laundry* di sekitar kampus UIN RIL ..... 69
- B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Usaha Jasa *Laundry* di sekitar kampus UIN RIL ..... 74

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 79
- B. Rekomendasi ..... 80

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

Lampiran1

Lampiran2





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Guna memperjelas persepsi pokok permasalahan, maka perlu penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Usaha Jasa Laundry di Sekitar Kampus UIN RIL)”**. Judul tersebut terdiri dari beberapa istilah sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau padangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>1</sup>

#### **2. Hukum Islam**

Adalah ungkapan bahasa hukum yang umumnya digunakan untuk menyatakan kelompok hukum yang mencakup dalam wilayah kajian hukum dalam Islam.<sup>2</sup>

#### **3. Implementasi**

Merupakan tindakan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011)h.1470

<sup>2</sup>Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016)h,9

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),h.352

#### 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

**Konsumen**, yang selanjutnya disebut dalam tulisan skripsi ini dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan landasan hukum paling pertama dan utama dalam menyelesaikan permasalahan dan kasus-kasus tentang konsumen yang menderita kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban mereka didalam menjalankan usahanya.<sup>4</sup>

Jadi dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa *Laundry* menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Islam tentang Perlindungan Konsumen adalah upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam bertanggung jawab yang merupakan tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan kasus konsumen yang mengalami kerugian yang di akibatkan oleh pelaku usaha.

#### B. Alasan Memilih Judul

Sebagai alasan yang mendorong memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, adalah sebagai berikut:

##### 1. Alasan Objektif

- a. banyaknya usaha *laundry* yang berada di sekitar tempat tinggal yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengkaji tentang perlindungan konsumen.

---

<sup>4</sup>Eli Wurida Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2015),cet-1, h.59

- b. Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah diatur tentang perlindungan konsumen sehingga perlu pengkajian melalui penelitian kepada pemilik-pemilik usaha jasa *laundry*.

## 2. Alasan Subjektif

Permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara terperinci, karena adanya relevansi permasalahan tersebut dengan disiplin ilmu yang dipelajari. Lokasi penelitian mudah dijangkau dan dekat dengan tempat tinggal penulis, referensi yang di dapat cukup tersedia.

## C. Latar Belakang Masalah

Pada usaha jasa *laundry* di sekitar kampus UIN Raden Intan Lampung Sukarame Bandar Lampung pernah terjadi permasalahan dalam pertanggungjawaban terhadap konsumen yaitu permasalahan yang terkait tentang kehilangan atau tertukarnya pakaian milik konsumen, kelunturan, kurang rapih dalam penyetricaan dan kurang tepat waktu dalam menyelesaikan pencucian pakaian milik konsumen. Hal ini disebabkan karena kurangnya karyawan untuk membantu menyelesaikan pencucian tersebut dan kurang sesuai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkait dengan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat 15 BAB dan 65 Pasal.

Dalam hal ini di atur dalam kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi sebagai berikut:

يُضَافُ الْفِعْلُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا الْأَمْرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبَرًا

*Suatu perbuatan itu dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya dan bukan kepada yang memerintahkan perbuatan tersebut, kecuali pada suatu kasus yang terpaksa.*<sup>5</sup>

Jasa *laundry* telah tersebar diberbagai daerah salah satunya yaitu di Kota Bandar Lampung. Jasa *laundry* telah berkembang pesat di Bandar Lampung dan memiliki berbagai macam sistem dan segmen pasar yang berbeda-beda. Jasa *laundry* dengan sistem kiloan yang banyak ditujukan bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Jasa *laundry* dengan sistem pembayaran berdasarkan jenis barangnya misal: gordeng, seprei, karpet, dan boneka. Jasa *laundry* ini biasanya juga ditujukan untuk kalangan ibu rumah tangga.

Dalam wilayah kota Bandar Lampung khususnya di daerah kecamatan sukarama saat ini diwilayah tersebut cukup banyak perumahan yang baru dibangun. Apalagi sekarang di daerah tersebut terdapat kampus yaitu UIN RIL, dan semakin tingginya tingkat mahasiswa yang masuk semakin banyak peluang usaha yang ada disekitar kampus yang maju pesat dan tidak terkecuali peluang usaha jasa *laundry*, kebanyakan mahasiswa yang sibuk dengan urusan perkuliahan sehingga tidak sempat untuk mencuci baju dan apalagi sudah ada usaha jasa *laundry* disekitar kampus tersebut semakin

---

<sup>5</sup> Syamsul Hilal, Urgensi *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* dalam pengembangan ekonomi Islam, *Jurnal Al-Adalah* Vol X No.1 Januari 2011



mempermudah mahasiswa untuk menjalankan perkuliahannya dengan tenang karena sudah tidak terlalu memikirkan pakaian yang belum sempat mereka cuci. Wilayah penelitian di Sukarame adalah sekitar wilayah kampus UIN RIL merupakan wilayah yang memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak.

Namun permasalahan yang terjadi di kota Bandar Lampung khususnya di daerah Sukarame terdapat pelaku usaha *laundry* yang belum memahami adanya aturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>6</sup>

Berdasarkan di atas fakta ini mendasari penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini difokuskan pada perlindungan konsumen dan tanggung jawab bagi pemilik usaha jasa *laundry*, yang berada di sekitaran kampus UIN RIL dengan radius 500 meter.

Adapun penelitian ini terdapat sub-subfokus sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pelaku usaha
2. Perlindungan terhadap konsumen

#### **E. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.129-130

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa *laundry* di sekitar kampus UIN RIL?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa *laundry* di sekitar kampus UIN RIL?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan Penelitian tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa *laundry* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa *laundry* di sekitar kampus UIN RIL.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa *laundry* di sekitar kampus UIN RIL.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

##### **a. Secara teoritis**

Secara teoritis penelitian ini sebagai sumbangan pengetahuan bagi para pembaca khususnya yang terkait dalam pembahasan dalam skripsi ini.

### b. Secara praktis

Secara praktis yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pengguna jasa *laundry* mengenai perlindungan hukum atas dirinya sebagai konsumen.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah secara sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil sebuah kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.<sup>7</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Menurut jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>8</sup> Yakni dari berbagai informasi yang berkaitan dan dari buku-buku yang membahas tentang perlindungan konsumen, termasuk juga *primer* hasil *interview* penulis dengan para pihak yang bersangkutan sebagai objek penelitian. Jadi untuk mendapatkan sebuah informasi tentang tanggungjawaban pelaku usaha jasa *laundry* tentang perlindungan konsumen.

<sup>7</sup>Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Logos cet 1, 1997),h.1

<sup>8</sup>Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015),h.10

## b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*.<sup>9</sup>

*Deskriptif* adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dengan *interpretasi* yang tepat sehingga gambaran dan penjelasan menjadi jelas. Sedangkan *analisis* adalah cara untuk menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.

## 2. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>10</sup>

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam penelitian ini data *primer* akan didapatkan dari wawancara dengan pengusaha jasa *laundry* dan konsumen.

b. Data *Sekunder* akan diperoleh dari buku, dokumentasi, surat kabar, dan literatur yang ada serta peraturan peundang-undangan yang relevan, dalam hal ini meliputi Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

## 3. Sampel

Sampel yaitu cara mengambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu mengambil sampel yang ditunjukan kepada

---

<sup>9</sup>M.Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),h.63

<sup>10</sup>Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riseach Bisnis* (Jakarta: PT. Bumi Aksara,2006),h.57



responden yang dikehendaki dan dianggap mewakili serta dapat memberikan keterangan yang mengarah sehingga memperoleh data yang *factual*. Adapun sampel dalam penelitian ini mengambil 3(tiga) *laundry* yang berada disekitar kampus UIN RIL radius 500 meter.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah pengumpulan data.<sup>11</sup>

##### a. *Observasi*

Metode *Observasi* adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.<sup>12</sup> Dengan demikian *observasi* dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mendapatkan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara penanya (pewawancara) dengan penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide*.

Untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang tanggung jawab pelakulusaha jasa *laundry* tentang perlindungan konsumen, penulis

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, cetakan ke-14 (Bandung: Alfabeta, 2009),h.402.

<sup>12</sup>Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisni* (Yogyakarta, STIM YKPN, 2008),h70.

melakukan wawancara dengan pihak pemilik usaha jasa *laundry* sekitar kampus UIN RIL radius 500 meter.<sup>13</sup>

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>14</sup> Dokumentasi disini termasuk menghimpun data berupa dokumen tentang situasi di lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah suatu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.

Dokumentasi merupakan salah satu cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry*, seperti data primer yaitu data-data yang berasal dari izin lapangan dan data-data sekunder diambil dari data-data pustaka dengan cara membaca referensi terkait

#### 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring mengatur, dan mengklarifikasi. Menimbang dan menyaring adalah benar-benar relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan adalah menggolongkan atau menyusun menurut

---

<sup>13</sup>Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Lapangan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h.102

<sup>14</sup>Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006),h.83.

aturan tertentu.<sup>15</sup> Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau *relevan* dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau aturan rumusan masalah.
- c. Sistematisasi Data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>16</sup>

#### 6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, akan digunakan teknik *deskriptif analisis* yaitu dengan memaparkan atau menggambarkan hasil studi lapangan dan hasil studi literatur. Kemudian menganalisis data yang diperoleh dan selanjutnya digunakan untuk membahas permasalahan yang ada sehingga mampu memberikan gambaran *empiric* dan *factual*, baik yang bersifat *yuridis* maupun bersifat *sosiologis* tentang tanggung jawab pelaku usaha jasa *laundry* terhadap konsumen dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

---

<sup>15</sup>Juliansyah Noor, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2001),h.141.

<sup>16</sup>Abdul Kadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004),h.126

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

##### **1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999**

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud Pasal (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.



- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>17</sup>

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 4 Pasal yang menggambarkan sistem hak dan kewajiban dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia yaitu Pasal (4), (5), (6), (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan hak dan kewajiban sebagai berikut:

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada konsumen, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/ atau jasa yang digunakan

---

<sup>17</sup>Hamadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet-5, h.125

5. Hak untuk mendapatkan *advokasi*, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak *deskriminatif* berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.
7. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
8. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perUndang-Undangan.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang konsumen, antara lain adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beriktikad baik dalam melakukan, transaksi pembelian barang dan/ atau jasa
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid*,..h.216

Hak-hak yang dibebankan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada pelaku usaha, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 6 antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang dipergunakan.
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen beriktikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah.<sup>20</sup>

1. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya

---

<sup>19</sup>Ibid,..h.60.

<sup>20</sup>Ibid,..h.61.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak *deskriminatif*. Pelaku usaha dilarang menbeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan pelaku usaha dilarang membeda-bedaka mutu pelayanan kepada konsumen
4. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa ketentuan standar mutu barang dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau yang diperdagangkan, yang dimaksud dengan barang dan/ atau jasa tertentu adalah barang yang dapat diuji atau dicoba tanpa mengakibatkan kerusakan atau kerugian
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.



7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>21</sup>

## 2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Pengusaha dalam Dunia Usaha

Dalam upaya untuk melindungi hak-hak konsumen terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pada prinsipnya telah mengklarifikasi bentuk-bentuk pelanggaran tersebut kedalam 3 kelompok yang dijabarkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, yakni:<sup>22</sup>

- a. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)
- b. Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16)
- c. Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat(1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang;

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut;

---

<sup>21</sup>Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h.217

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi atau pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan/ atau pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku;

Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan sebagai berikut:<sup>23</sup> 2(dua) pelaku usaha dilarang memperdagangkan diantaranya:

1. Barang rusak
2. Cacat atau bekas
3. Serta tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

Sedangkan ayat (2) pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan secara lengkap dan benar. Selanjutnya mengenai perbuatan dilarang bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran. Ketentuan ini di atur dalam Pasal 9 sampai dengan 16 UUPK.

Dalam Pasal UUPK pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar dan/ atau seolah-olah:

1. Barang tersebut telah memenuhi dan/ atau potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
2. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
3. Barang dan/ atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/ atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;

---

<sup>23</sup>*Ibid*

4. Barang dan/ atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
5. Barang dan/ atau jasa tersebut tersedia;
6. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
7. Barang merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
8. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
9. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/ atau jasa lain;
10. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
11. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti;

Kemudian pada Pasal 10 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan tentang:

1. Harga atau tarif suatu barang dan/ata jasa;
2. Kegunaan suatu barang dan/ atau jasa;
3. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu barang dan/ atau jasa;
4. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
5. Bahaya penggunaan barang dan/ atau jasa;

Pasal 11 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral/ lelang, dilarang mengelabui/ menyesatkan konsumen dengan:

1. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang-barang lain;
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
5. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
6. Menaikkan harga atau tarif barang dan/ atau jasa sebelum melakukan obral;

Sedangkan Pasal 12 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau di iklankan.

Disini ditegaskan bahwa pelaku usaha harus memiliki iktikad baik dalam menjalankan usahanya. Pasal 13 UUPK juga mengatur hal yang



serupa, yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/ atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud memberikannya tidak sebagaimana yang dijanjikan.

Sedangkan yang berkaitan dengan undian, pelanggaran diatur di Pasal 14 UUPK menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk;

1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
2. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
3. Memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
4. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Pada Pasal 15 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa dilarang melakukan dengan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.<sup>24</sup>

Pada Pasal 16 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pesanan dilarang untuk;

1. Tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;

---

<sup>24</sup>*Ibid*

2. Tidak menepati janji atas sesuatu pelayanan dan/ atau prestasi

Pada Pasal 17 UUPK ditentukan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang;

1. Mengelabui konsumen mengenai *kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa, serta ketetapan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;*
2. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
3. Menurut informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
4. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
5. *Mengeksploitasi* kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
6. Melanggar etika dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

### 3. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen

a. Sanksi administrasi atau sanksi *administratif*

Merupakan sebuah sanksi yang dikenakan terhadap perbuatan melawan hukum yang melanggar *administratif* maupun ketentuan Undang-Undang yang bersifat *administratif*. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal ayat (2), menyatakan bahwa sanksi administrasi yang diberikan adalah berupa penetapan ganti

kerugian paling banyak adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi administrasi tersebut dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26, sebagaimana diatur dan dijelaskan di dalam UUPK. Pelaku usaha akan dikenakan sanksi administrasi ketika mereka tidak memberikan ganti kerugian kepada konsumen yang menderita kerugian, baik yang berupa penggantian produk atau barang yang sejenis dengan kerugian yang diderita konsumen, maupun pengambilan uang kepada konsumen dengan jumlah yang setara dengan kerugian, serta pelaku usaha yang tidak bersedia memberikan ganti-rugi berupa santunan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK.

Pelaku usaha dapat dikenakan sanksi *administratif*, karena mereka tidak mengganti kerugian kepada konsumen yang menderita kerugian, dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi berlangsung, sebagaimana telah dijelaskan di dalam Pasal 19 ayat (3) UUPK. Sanksi *administratif* juga diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan yang tidak bertanggung jawab atas iklan yang di produksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut, hal ini sebagaimana telah diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 20 UUPK. Selanjutnya di dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2), pelaku usaha juga dapat dijatuhkan sanksi karena melanggar ketentuan pasal ini,

jika pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1(satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jika pelaku usaha tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan ganti kerugian maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi *administratif*, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

b. Sanksi pidana

Konsumen yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang diedarkan dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, selain dapat mengajukan tuntutan secara pidana. Hal tersebut dikarenakan di dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah menjelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya. Berkaitan dengan sanksi pidana maka seorang pelaku usaha dapat dikenakan pidana berupa penjara maupun pidana denda. Pelaku usaha dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara selama 5(lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.2000.000.000,00 (dua milyar rupiah), ketika mereka melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 19 ayat(4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berkaitan dengan pasal tersebut maka seorang pelaku usaha akan dapat dijatuhkan sanksi pidana tersebut pada saat yang bersangkutan memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang:

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label barang tersebut;
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya , mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan dan/ atau jasa tersebut;
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
7. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

Pelaku usaha dapat dijatuhi sanksi pidana ketika mereka memperdagangkan barang, sediakan *farmasi* maupun pangan yang



rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Selain dengan dikenai sanksi pidana usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 ini wajib menarik barang dan/ atau jasa yang diperdagangkannya dari peredaran pasar.

Alasan-alasan yang menjadikan seorang pelaku usaha dapat dijatuhkan atau dikenai sanksi pidana yang berupa pidana penjara maupun pidana adalah sebagai berikut;

Pertama, di dalam hal penujulan yang dilakukan melalui obral atau lelang pelaku usaha mengelabui dan/ atau menyesatkan konsumen dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 berikut ini:

1. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
2. Menyatakan barang dan/ atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
3. Tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
4. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/ atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;

Kedua, pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut

tidak bermaksud melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau di iklankan berkaitan dengan hal tersebut maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Ketiga, pelaku usaha yang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/ atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan akan tetapi tidak sesuai yang diperjanjikan, maka sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 13 ayat (1)UUPK mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dengan demikian dapat diberlakukan sanksi pidana baginya.

Keempat, pelaku usaha yang dalam melakukan penawaran barang dan/ atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian sebagaimana ketentuan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam Pasal 14 UUPK di bawah ini:

1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang telah ditentukan;
2. Mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
3. Memberikan hadiah tidak sesuai yang dijanjikan;
4. Mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan;

Kelima, pelaku usaha yang didalam menawarkan barang dan/ atau jasa melalui pemesanan juga dapat dikenai sanksi pidana, jika mereka tidak menepati pesanan dan/ atau kesepakatan waktu menepati janji atas suatu pelayanan, dengan demikian maka pelaku usaha dapat di jatuhkan sanksi di karenakan usaha telah melanggar ketentuan Pasal 16 UUPK.

Keenam, pelaku usaha periklanan yang di dalam memproduksi iklannya tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/ atau jasa, serta melanggar etika dan/ atau jasa ketentua peraturan perundang-undangan mengenai periklanan juga dapat dikenakan sanksi pidana, karena telah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf (d) dan huruf (f).

Berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang merugikan konsumen atas barang dan/ atau jasa yang diperdagangkannya, sehingga mengakibatkan kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku terhadap sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 tersebut, pelaku usaha dapat dijatukan hukuman tambahan berupa:

1. Perampasan barang tertentu;
2. Pengumuman keputusan hakim;
3. Pembayaran ganti rugi;
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;

5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. Pencabutan izin usaha.

c. Sanksi perdata

Hukum perdata merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, yang terjadi dalam pergaulan hidup keluarga maupun masyarakat. Hukum perdata memiliki bentuk sanksi hukum yang berupa kewajiban seseorang untuk memenuhi kebutuhan prestasi, dan hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum yang baru. Sanksi hukum yang diterapkan dalam hukum perdata ini berbentuk ganti kerugian, yaitu berupa pengembalian uang maupun penggantian barang dan/ atau jasa perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan. Sanksi berupa ganti-rugi tersebut wajib diberikan tujuh hari setelah tanggal transaksi berlangsung. Selanjutnya di dalam hukum perdata berkaitan dengan perkara perdata, hakim memberikan putusan yang berupa putusan *condemnatoir*, putusan *declaratoir*, dan putusan *constitutief*.

Berikut ini akan dijelaskan mengenai maksud dari masing - masing putusan hakim tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Putusan *condemnatoir* merupakan putusan yang bersifat menghukum bagi pihak yang disalahkan atau dituntut untuk membayar ganti kerugian dan pihak yang kalah dihukum dengan

membayar biaya perkara. Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* ini amarnya berbunyi "menghukum dan serterusnya", sebagai contoh putusan yang menghukum terhadap tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, untuk menyerahkan suatu barang atau mengosongkan sebuah persil, melakukan atau melarang tergugat untuk tidak melakukan suatu perbuatan atau keadaan tertentu.

2. Putusan *declaratoir* merupakan putusan yang menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, di mana putusan ini menyatakan dan menegaskan suatu keadaan yang sah atas sebidang tanah sengketa, atau putusan yang menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris dan pewaris yang bernama fulan, ataupun putusan lain yang berisi penolakan terhadap putusan bersifat *declamatoir*.

3. Putusan *constitutief* merupakan putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru. Sebagai contoh adalah putusan yang membatalkan suatu perjanjian, putusan yang di dalamnya memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat



#### 4. Unsur-unsur yang dijatuhkannya Sanksi Bagi Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum merupakan suatu perbuatan melawan hukum.<sup>25</sup>

Hukuman baru bisa dijatuhkan kepada pelaku pidana apabila tindak pidana yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur yang ada pada ketentuan hukum positif (KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999). Tindak pidana memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut:

##### a. Obyektif

Unsur ini pada umumnya dapat terdiri atas perbuatan atau suatu akibat. Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>26</sup>

##### b. Subyektif

Unsur ini terdiri dari suatu kehendak atau tujuan yang terdapat di dalam jiwa pelaku, unsur ini dirumuskan dengan istilah sengaja, niat dan maksud.<sup>27</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindakan pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan

<sup>25</sup>Haryono, *Sumber Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h.5

<sup>26</sup>P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), h.184

<sup>27</sup>*Ibid*, h.72

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>28</sup>

Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, pengeceran dan sebagainya. Cakupan luasnya pelaku usaha ini memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha adalah pembuat produk jadi dengan maksud untuk dijual-belian dalam transaksi perdagangan.<sup>29</sup>

Menurut kajian *fiqh* Islam, kebenaran dan keakuratan informasi ketika seorang pelaku usaha mempromosikan produk dagangannya

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru dan Suratman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*(Jakarta: Rajawali Pers,2014), h.8

<sup>29</sup> Ibid. h 16

menempati kajian yang disignifikan. Islam tidak mengenal sebuah istilah *kapitalisme* klasik yang berbunyi “*caveat emptor*” atau “*Let the buyer beware*” (pembelilah yang harus berhati-hati), tidak pula “*caveat venditor*” (pelaku usahalah yang harus berhati-hati). Tetapi dalam Islam berlaku prinsip keseimbangan (*al-ta’adul*) atau *ekuilibrium* dimana pembeli dan penjual haruslah berhati-hati dan dimana hal itu tercermin dalam teori perjanjian (*nazhariyyat al-uqud*) dalam Islam.<sup>30</sup>

Para ahli hukum Islam terdahulu tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikan objek kajian khusus. Namun jika dikembalikan pada prinsip-prinsip umum bisnis dalam Islam, maka konsumen diartikan “setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakaian suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik dipakai untuk proses produksi selanjutnya, konsumen dalam Islam tidak terbatas pada orang perseorangan saja, tapi juga mencakup suatu badan hukum seperti yayasan wakaf atau perusahaan dan lembaga tertentu.

Kata barang dan jasa secara singkat dalam hukum ekonomi Islam disebut sebagai harta (*al-mal*) karena harta terdiri dari barang dan jasa. Sedangkan penggalan kalimat “baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”. Dengan demikian dalam Islam tidak ada bedanya antara pamakai akhir dengan pemakai medium atau konsumen sementara. Para ahli hukum Islam juga tidak membedakan harta antara barang konsumsi, barang produksi dan barang

---

<sup>30</sup>Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: Malang Press, 2007),h.28

perantara sebagaimana yang terdapat dalam ilmu ekonomi umum. Hal ini membawa pengaruh pada definisi konsumen yang harus dilindungi dalam Islam, karena konsumen dalam Islam termasuk semua pemakai barang, apakah barang itu dipakai langsung hingga habis atau dijadikan alat perantara untuk diproduksi selanjutnya.

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

a. hak-hak pelaku usaha menurut hukum Islam sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan peraturan perlindungan konsumen secara *empiris* seperti saat ini. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat ini, namun pengaturan perlindungan konsumen yang diajarkan Rasulullah sangat mendasar, sehingga pengaturan tersebut menjadi cikal bakal produk hukum perlindungan konsumen modern.

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/produsen dan konsumen. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak.<sup>31</sup> Segala manfaat barang setelah penjualan menjadi hak pembeli dan sebaliknya, segala kerugian atau kerusakan barang menjadi tanggung jawab pembeli. Ketentuan ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallaallahu 'alaihi wa sallam dalam hadist berikut:

---

<sup>31</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet-2, h.58-59

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقِيمَ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدِ اسْتَعْلَى غُلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَرَجُ بِا لْضَمَانِ

Aisyah Radhyallahu 'anhuma mengisahkan “ada seorang lelaki yang mengambil seorang budak. Tidak seberapa lama setelah ia mendapatkan sesuatu cacat pada buruh tersebut. Karena tidak mau rugi. Ia mengembalikannya (kepada penjual). Akibatnya penjual mengadu (kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam) dan berkata “wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah mengerjakan budakku. Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab keluhannya dengan bersabda, 'keuntungan adalah imbalan atas tanggung jawab/jaminan.<sup>32</sup>

Jadi dalam hadist ini ditegaskan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjelaskan bahwa kegunaan barang adalah imbalan merupakan konsekuensi langsung dari kepemilikan anda atas suatu barang. Dengan demikian, maka sebagai pembeli maka anda harus siap menerima ketentuan ini, dan sebagai penjual anda pun sewajarnya rela dengan kenyataan ini.

- b. Kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi disamping merupakan hak konsumen, juga karena ketidakadaan informasi atau informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha yang merupakan salah satu jenis

<sup>32</sup> Riwayat Abu Dawud hadist no.1315, dan dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil hadist no.1315



cacat produk (cacat informasi) yang akan sangat merugikan konsumen.<sup>33</sup>

Para pengusaha perilaku bisnis menentukan sukses atau gagalnya bisnis yang dijalankan. Dalam Al-Qur'an surat (Al-Imran (3) ayat 159) menjelaskan:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ  
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. (Al-Imran (3):159)

Maksudnya: urusan peperangan dan hal-hal duniawiyah lainnya, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lainnya.<sup>34</sup>

Berdasarkan ayat diatas, jelas bahwa setiap manusia dituntunkan untuk berlaku lemah lembut agar orang lain merasakan kenyamanan bila berada disampingnya. Apabila dalam pelayanan yang mana konsumen banyak pilihan, bila pelaku usaha tidak mampu memberikan rasa aman dangan kelemahan, kelembutan maka konsumen akan berpindah kepengusaha lain perilaku bisnis dalam memberikan pelayanan harus menghilangkan jauh-jauh sifat keras hati

<sup>33</sup> Ibid. h 54-55

<sup>34</sup> Qs. Al-Imran (3):159

dan harus memiliki sifat pemaaf kepada pelanggan agar pelanggan terhindar dari rasa takut, tidak percaya dan perasaan adanya bahaya dari pelayanan yang diterima.

### 3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Di dalam Islam, tanggung jawab pelaku bisnis memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *vertical* dan *horizontal*. Kedua dimensi ini dapat diidentifikasi sebagai berikut.<sup>35</sup>

1. Adanya dimensi tauhid sebagai ciri tanggung jawab secara *vertical* kepada Allah SWT.
2. Adanya dimensi amanah sebagai *khalifah* dimuka bumi bagi para pelaku bisnis.
3. Sumber daya tersedia berlimpah karena karunia Allah SWT yang dilimpahkan ke muka bumi ini, yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan bersama antara sesama manusia.
4. Harus saling tolong menolong dan bekerja sama serta membina saling mengasihi di antara sesama manusia.
5. Bisnis merupakan sarana ibadah bagi para pelaku bisnis.

Menurut Syed Nawab Hider Nawvi tanggung jawab manusia yang berhubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat di representasikan dengan empat *aksioma etik*, yaitul *unity* (kestua/tauhid), *equilibrium* (keseimbangan/kesejajaran), *freelwill* (kebebasan), dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*

*responsibility*(tanggung jawab).<sup>36</sup> Bentuk tanggung jawab kepada Allah SWT, diri sendiri dan masyarakat secara luas adalah dengan adanya iktikad baik di dalam memproduksi barang-barang, sehingga tidak terlintas sedikitpun hal-hal yang dapat membawa dampak kerugian kepada konsumen. Karena disadari pertanggungjawabannya bukan hanya kepada masyarakat selaku konsumen, tetapi yang paling penting adalah pertanggung jawabannya kepada Allah SWT.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibildi dalam al-Muwafaqat, tujuh pokok syari'at Islam terdiri atas lima komponen: (1) memelihara agama (*hifdh al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*), (3) memelihara akal (*hifdh al-aql*), (4) memelihara keturunan (*hifdh nasl*), dan (5) memelihara harta (*hifdh al-maal*).<sup>37</sup> Untuk mengimplementasikan tujuh pokok syari'at Islam ini dalam produksi, pelaku bisnis atau perusahaan harus bertanggung jawab dalam melakukan serangkaian produksi yang dibenarkan oleh *syara'*.

#### 4. Konsumen dan Perlindungan Konsumen

Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.

---

<sup>36</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Syaifu Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2003, h.37

<sup>37</sup>[http:// www.academia.edu/734217/ Makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial](http://www.academia.edu/734217/Makalah_Tanggung_Jawab_Sosial_Perusahaan_Dalam_Mewujudkan_Kesejahteraan_Sosial) Diakses Tanggal 8 September 2014

Pengertian konsumen yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.<sup>38</sup>

Dalam hukum Islam, perlindungan konsumen mengacu pada konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, sampai akibat mengonsumsi barang atau jasa. Maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsi melanggar ketentuan-ketentuan syara'.<sup>39</sup>

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, tapi mengenai kepentingan publik secara luas, bahkan mengenai hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.<sup>40</sup>

Islam menekankan sisi moralitas dalam semua kegiatan yang dilakukan manusia, oleh karena itu hukum-hukum yang ditetapkan Allah termasuk dalam aspek ekonomi atau bisnis, harus memiliki suatu keterkaitan. Keberhasilan dalam pandangan ekonomi Islam terletak pada kesesuaian antara kebutuhan moral dan material. Jika moralisme dipisahkan dari

---

<sup>38</sup>A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta:Daya Widya,1999), h.13

<sup>39</sup> Ibid., 25

<sup>40</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*,(Jakarta: Kencana Prenada, 2013),h.24

suatu kegiatan ekonomi, maka stabilitas dan keseimbangan sosial akan sangat rapuh dan akhirnya akan runtuh. Karena saat itu yang terjadi adalah persaingan tidak sehat, curiga-mencurigai, dan kerja sama yang tidak saling menguntungkan. Dalam konteks moralitas ada beberapa pembahasan antara lain:

Kejujuran dalam berbisnis lebih berpengaruh dari pada kesamaan agama, bangsa bahkan kekeluargaan yang tidak disertai kejujuran. Kunci keberhasilan bisnis dan kelanggengannya adalah kejujuran dalam berpromosi. Promosi yang berlebihan mengandung kebohongan merupakan salah satu bentuk ketidak jujuran yang justru pada akhirnya merugikan pembisnis dan produknya. Promosi yang berlebihan adalah bersumpah “demi Allah” untuk meyakinkan pihak lain tentang kebenaran tawarannya yang mengandung kebohongan. Hal tersebut dilarang dalam Al-Qur'an surat (Al-Baqarah (2) ayat 224).<sup>41</sup>

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا  
بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

Artinya: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia[139]. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Al-Baqarah (2):224).

Maksudnya: melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat.

---

<sup>41</sup> Qs. Al-Baqarah (2): 224

Menurut Islam negara memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kegiatan ekonomi, baik untuk mengawasi kegiatan pasar maupun untuk mengatur kegiatan dan melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Dasar hukum campur tangan negara dalam ekonomi Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat (An-Nisa (4) ayat 59).<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (An-Nisa:59).<sup>43</sup>

## 5. Hak dan Kewajiban Konsumen

### a. Hak-hak Konsumen dalam Hukum Islam:

Menurut Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:<sup>44</sup>

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.

<sup>42</sup>Ahmad Muhamad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan H. Imam Saefudin, Bandung, Pustaka Setia, 1999, h.101.

<sup>43</sup>Qs. An-Nisa:59

<sup>44</sup> Muhamad & Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta.BPFE,2004),h.195-234



2. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
3. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
4. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
6. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi dapat dibedakan menjadi 5 yaitu:

1. Ganti rugi karena kerusakan (*Dha-man Itlaf*)
2. Ganti rugi karena transaksi (*Dha-man 'Aqdin*)
3. Ganti rugi karena perbuatan (*Dha-man Wadh'u Yadin*)
4. Ganti rugi karena penahanan (*Dha-man al-Hailulah*)
5. Ganti rugi karena tipu daya (*Dha-man al-Maghrur*)

*Dhaman Itlaf* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang. Ganti rugi *itlaf* tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. *Dhaman 'Aqdin* adalah terjadinya suatu transaksi sebagai adanya penyebab ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi *wadh'u yadin* adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada ditangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah

transaksi yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. *Dhaman al-maghrur* adalah ganti rugi akibat tipu daya. *Dhaman al-maghrur* sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan dengan istilah *khiyar*. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan transaksi bisnis atau tidak. Para ulama membagi hak *khiyar* menjadi tujuh macam yaitu :*khiyar majlis*, *khiyar syarath*, *khiyar aibi*, *khiyar tadlis*, *khiyar ru'yah*, *khiyar al-ghabn al-fasisy* (*khiyar al-murtasil*), dan *khiyar ta'yim*.

*Khiyar majlis*, adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis selama masih berada dalam suatu tempat (*majlis*).<sup>45</sup>

*Khiyar syarath* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis sesuai dengan waktu yang disepakati atau syarat yang telah ditetapkan bersama. *Khiyar syarat* disyariatkan untuk menjaga kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satunya dari konsekuensi satu transaksi yang kemungkinan di

---

<sup>45</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazdhab*, terjemahan H. Chabitul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001, h.41

dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang bertransaksi dalam masa *khiyar* syarat dan waktu yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama *fiqh* sepakat bahwa *khiyar syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.<sup>46</sup>

*Khiyar aibi* adalah hak untuk membatalkan transaksi bisnis apabila obyek transaksi cacat sekalipun tidak ada perjanjian sebelumnya. Cacat yang dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan barang adalah cacat yang dapat menyebabkan turunnya harga.

*Khiyar tadlis* terjadi jika penjual mengelabui pembeli. Dalam hal ini pembeli memiliki hak *khiyar* selama tiga hari.<sup>47</sup> Di dalam kitab *Fiqh Empat Madzhab*, Abdurrahman Al-Jaziri menyebut *khiyar* jenis ini dengan istilah “*khiyar al-taghiri al-fi'liy* (*khiyar* karena tertipu oleh tindakan penjual).<sup>48</sup>

*Khiyar ru'yah* adalah hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bisnis yang dilakukan terhadap suatu objek yang belum dilihat pada saat transaksi jual/beli dilaksanakan.<sup>49</sup> Untuk sahnya transaksi jual/beli bisnis disyaratkan barang dan harganya diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Maka tidak sah

---

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, op.cit. h, 111

<sup>47</sup> Yusuf As-sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisni Ala Kapasitas*, Bogor, Al-Azhar Press, 2009, h.312

<sup>48</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, Loc Cit, h.87

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, Op Cit, h.139-141

menjual atau membeli sesuatu yang tidak jelas, karena hal itu akan mendatangkan perselisihan.<sup>50</sup>

*Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-murtasil)* jika penjual dan pembeli merasa ditipu maka ia akan memiliki *khiyar* untuk menarik diri dari transaksi jual beli/bisnis dan membatalkan transaksi tersebut. *Khiyar* jenis ini pada suatu saat bisa menjadi hak penjual dan pada saat yang lain bisa juga menjadi hak pembeli.

*Khiyar ta'yin* adalah pemberian hak kepada pembeli untuk memilih barang yang diinginkan dari sejumlah atau kumpulan barang yang dijual kendatipun barang tersebut berbeda harganya, sehingga konsumen dapat menentukan barang yang dia kehendaki.<sup>51</sup>

b. Kewajiban konsumen dalam hukum Islam:

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskan sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/latau jasa;
2. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;

<sup>50</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, Op Cit, h.106

<sup>51</sup>*Ibid*,...h.316

<sup>52</sup>M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, dikutip dari [http:// ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395) diakses Tanggal 14 Oktober 2014

3. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan, yang terealisasi dengan adanya *ijab* dan *qabul* (*sighah*).
4. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen

Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan ini sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah*, yaitu untuk mewujudkan *kemaslahah* (kebaikan).

Hukum antara pelaku usaha *laundry* dan konsumen merupakan salah satu contoh perjanjian untuk melakukan jasa tertentu. Dalam Islam disebut *al-Inizal bi al-'Amal* artinya adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak untuk melakukan sesuatu. Sumber perikatan kerja disini adalah *istisna'* dan *ijarah*, *istisna'* ini kerja dan bahan adalah dari pembuat. Apabila bahannya dari pemesan, maka tidak merupakan *istisna'* melainkan *ijarah*.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Eka Nuraini Rahmawati & Ab mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol.XII, No.4, Desember 2015.

Objek perjanjian dapat berupa harta benda (jual beli). Manfaat (sewa), pekerjaan, perempuan (pernikahan). Syarat-syarat objek antara lain:

1. Bisa menerima hukum *syara* (dibolehkan *syara*)
2. Ada ketika perjanjian
3. Diketahui
4. Bisa diserahkan

#### **6. Tanggung Jawab dalam Implementasi Peraturan PerUndang-Undangan.**

Salah satu Ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieq membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuatan Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.15



Berdasarkan hal yang telah dipaparkan diatas, *fiqh siyasah* yang dapat digunakan dalam politik pelaksanaan perundang-undangan (*siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*) termasuk dalam persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi* dan lain-lain.

Dalam konteks ini kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.

Tugas *Al-Sulthah Taanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perUndang-Undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini segera melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>55</sup>

Dalam wacana *fiqh siyasah* istilah *Al- Sulthah Al-Tanfidziyyah*, dalam kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah*, *khilafah*, *imarah* dan *wizarah*.

#### a. Konsep *imamah/imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut

---

<sup>55</sup> Ibid., h.62.

*nation people*. Menurut Kamus Munawwir, imamah bermakna imam atau pemimpin. Dari akar itulah muncul perkataan imamah.

Makna imam berarti pemimpin atau orang yang didepan. Kata imam dalam bahasa arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia saleh maupun tidak. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata ini dalam kedua arti itu, seperti diisyaratkan dalam Al-Qur'an surat (Al-Anbiya'(21) ayat 73)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ  
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

Artinya: “Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,”(Al-Anbiya'(21):73).<sup>56</sup>

Di Ayat lain digunakan kata imam-imam yang mengajak orang ke neraka, seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surat (Al-Qashash (28) ayat 41)

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا  
يُنصَرُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong”.(Al-Qashash (28):41)<sup>57</sup>

<sup>56</sup>Qs. Al-Anbiya'(21):73

<sup>57</sup>Qs. Al-Qashash (28): 41

Dengan demikian secara harfiah arti imam adalah pemimpin yang memiliki pengikut yang tidak dibatasi oleh ruang waktu dan tempat. *Imamah* menurut *doktrin Syi'ah* adalah tentang kepemimpinan politik dan spiritual dalam khilafah yang harus dipegang oleh salah seorang imam dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib setelah Nabi Muhammad meninggal.

Imamah sebagai sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-imamah mau u'atul khilafah al-nubuwwah fhisrah al-dnwasiyyah al-duny*, bahwa dalam pemilihan imam dilakukan dengan *ijma'* (*konsensus*) umat Islam dan hukumnya wajib. Dengan kata lain imam dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh orang yang berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal. Alasannya firman Allah SWT Al-Qur'an surat. (Al-Nisa (4):59)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ  
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu

*berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".(Al-Nisa (4):59)<sup>58</sup>*

Dalam kekuasaan imam ada empat macam (lembaga) kekuasaan Negara dengan tugas masing-masing berbeda, yakni:

1. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas umum/para menteri (*w zir*), tugas mereka mewakili imam dalam semua urusan tanpa pengecualian.
2. Lembaga yang kekuasaannya umum dalam tugas-tugas khusus/para pemimpin wilayah (*mir*).
3. Lembaga yang kekuasaannya khusus seperti seperti para hakim kepala (*qi al qut*), pemimpin tentara, penjaga keamanan wilayah perbatasan, direktorat, pertanggungjawaban pajak dan pertanggungjawaban zakat. Tugas mereka masing-masing terbatas pada *investigasi* khusus dalam semua tugas.
4. Lembaga yang kekuasaannya khusus dalam tugas-tugas khusus, seperti hakim daerah, pengawasan pajak daerah dan komandan militer daerah.

b. Konsep *khalifah*

*Khilafah* dalam terminologi politik Islam ialah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspeknya yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *khalifah* ialah pemimpin tertinggi umat

---

<sup>58</sup> Qs. Al-Nisa (4):59

Islam sedunia atau disebut imam *a'zam* yang sekaligus menjadi pemimpin Negara Islam sedunia. Khilafah dan khalifah itu hanya terwujud apabila:

1. Adanya seorang Khalifah saja dalam satu masa yang diangkat oleh umat Islam sedunia. Khalifah tersebut harus diangkat dengan sistem syura bukan dengan jalan kudeta, sistem demokrasi atau kerajaan.<sup>59</sup>
2. Adanya wilayah yang menjadi tanah air yang dikuasai penuh oleh umat Islam.
3. Adanya masyarakat muslim yang mayoritasnya mendukung, berbai'ah dan tunduk pada *Khalifah* (pemimpin tertinggi) dan *khilafah* (sistem pemerintahan Islam).<sup>60</sup>
4. *Khilafah* yang dibangun bukan berdasarkan kepentingan sekeping bumi atau tanah air tertentu, sekelompok kecil umat Islam tertentu dan tidak pula berdasarkan kepentingan pribadi khalifah atau kelompoknya, melainkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam secara keseluruhan serta tegaknya kalimat Allah (Islam) diatasbumi.

Sebab itu Imam Al-Mawardi dalam bukunya *Al-Ahkam Al-Sul Aniyyah* mengemukakan, bahwa objek *imamah* (kepemimpinan umat Islam) itu ialah untuk meneruskan *khilafah* nubuwwah

---

<sup>59</sup>Syekh Taqqiyudin Al-Nabhani, *Al-Nizam Al-Islam*, terj. Abu Amin, "*Peraturan Hidup Dakam Islam*", (Bogor: Pustaka Thaqiul Izzah, 2001), h.138.

<sup>60</sup> Ibid., h.137.

(kepemimpinan Nabi Saw) dalam menjaga agama Islam dan mengatur semua urusan duniawi umat Islam.

c. Konsep *Imarah*

Term *imarah* merupakan *ma dar* dari *mira* yang berarti *ke' miraan* atau pemerintahan. Kata *mir* bermakna pemimpin. Istilah *mir* dimasa Rasul dan Khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan *militer* (*mir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umar*. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna tersebut, *mir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

Secara umum penggunaan kata *mir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan dibalai aqifah Bani Sa'idah. Gelar *Amirul Mukminin* diselamatkan pertama kali pada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era abbasiyah banyak *mir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.<sup>61</sup>

d. *Wizarah*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* artinya beban, karena dia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazar* berarti tempat mengadu, kembali karena raja minta pendapat atau bantuan dari *wazir*.

---

<sup>61</sup> Ibid., h.229.



Karena memperkuat posisinya dengan *wazir* seperti badan dengan punggungnya.

Konsep wizarah juga sesungguhnya juga terdapat dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan, bahwas Nabi Musa mempunyai *wazir* bernama Harun yang membantu menangani urusan-urusannya. Jika dalam kenabian boleh, maka kaitannya dengan imamah juga boleh. Menurut *wizarah* (kementrian) ada 2 macam, yakni:

#### 1. *Wizarahlal-Tafw* (kementrian delegatori)

Adalah *wazir* oleh imam disertai tugas/wewenang tentang pengaturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan *ijtihad* para *wazir* sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakilkan kepada orang lain.

#### 2. *Wizarahlal-Tanf* (kementrian Pelaksana)

Adalah *wazir* yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun. Jika ia dilibatkan oleh imam untuk memberikan pendapat, maka ia memiliki fungsi sebagai *kewiziran*, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) belaka. Posisinya lebih lemah dan tidak ada syarat yang berat bagi seseorang '*w' zir*' model ini. Prinsipnya, dia harus mematuhi dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh

*khalifah*, selain ia harus memenuhi beberapa syarat mislanya; dapat dipercaya (jujur) benar ucapannya, tidak rangkus sehingga tidak menerima suap, tidak ada permusuhan dan kebencian rakyat, harus seorang laki-laki dan harus cerdas, yang syarat ini hanya diperlukan jika ia dilibatkan dalam memberikan pendapat.

Ada beberapa perbedaan antara *wazir tafw* dengan *wazir tanf* yakni:

1. *Wazir tafw* bisa menentukan hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus kezaliman.
2. *Wazir tafw* bisa menunjuk wali-walil (pimpinan daerah)
3. *Wazir tafw* bisa memimpin tentara dan mengurus perang;
4. *Wazir tafw* bisa mendayagunakan kekayaan Negara yang ada di bait al-mal.

Keempat wewenang ini tidak dimiliki oleh *wazir tanf* karena perbedaan tersebut sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wazir tafw* yakni:

1. *Wazir tafw* haruslah seorang yang merdeka;
2. *Wazir tafw* harus memiliki pengetahuan tentang syariat;
3. *Wazir tafw* harus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan.

Selain itu baik *wazir tafw* maupun *wazir tanf* memiliki wewenang dan persyaratan yang sama. Menurut Al-Mawardi, seorang

khalifah (imam) bisa mengangkat dua orang *wazir tanf*, secara bersamaan baik waktu maupun tempat.<sup>62</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan uraikan beberapa skripsi yang membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa laundry.

Skripsi yang disusun oleh Nanang Nugraha dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen pengguna Jasa *Laundry*” di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaku usaha jasa *laundry* telah bertanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Pertanggungjawaban tersebut berupa pencucian ulang apabila terdapat pakaian yang masih kotor, memperbaiki atau melakukan ganti rugi terhadap pakaian yang rusak, serta melakukan ganti rugi jika terjadi kehilangan pakaian yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku usaha dan konsumen.<sup>63</sup> Persamaannya adalah membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK. Perbedaannya tanggung jawab pelaku usaha yang bukan berdasarkan UUPK tetapi juga dengan bagaimana tanggung jawab berdasarkan etika bisnis Islam.

---

<sup>62</sup> Ibid., h.123

<sup>63</sup>Nanang Nugraha, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Di Kecamatan Sukasari Kota Bandung*”, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012). Dalam <http://nanangnugrah4.blogspot.co.id/2012/12/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen.html>, diakses pada tanggal 27 oktober 2019 pukul 13.46 WIB

Skripsi yang disusun oleh Valeria Ayu Iko Riri Bintara Putri dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (Studi Kasus Usaha Jasa *Laundry* Di Sekitar Kampus Universitas Katolik Soegijaapranta Semarang)”. Skripsi ini membahas pelaksanaan tanggung jawab pelaku usaha *laundry* terhadap konsumen, prosedur yang dilalui konsumen dalam hal ini menerima pertanggungjawaban pelaku usaha dan penggunaan klausa buku dalam perjanjian pelaku usaha *laundry* dengan konsumen.<sup>64</sup> Persamaannya adalah membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang berdasarkan UUPK. Perbedaannya tanggung jawab pelaku usaha yang bukan hanya berdasarkan UUPK tetapi juga dengan bagaimana tanggung jawab berdasarkan bisnis Islam.

Skripsi yang disusun oleh Imam Adri Fitriani yang berjudul “Tanggung Jawab Pengusaha Jasa *Laundry* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru Baru”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Skripsi ini membahas tentang hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha jasa *laundry*, pertanggung jawaban jasa usaha *laundry* dan upaya yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa usaha

---

<sup>64</sup>Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintaara Putri,” *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Lundry terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999( Studi Kasus Usaha Laundry Di Sekitar Kampus Universitas Katolik Soegijapranata Semarang)*” skripsi, (Semarang:Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2011), Dalam <http://repository.Uinka.ac.id/3506/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 14.30 WIB

laundry tersebut.<sup>65</sup> Persamaannya adalah membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK. Perbedaannya tanggung jawab pelaku usaha yang bukan hanya berdasarkan UUPK tetapi juga dengan bagaimana tanggung jawab berdasarkan etika bisnis Islam.

Skripsi yang disusun oleh Hernowo Bayu Wicaksono yang berjudul “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa *Laundry* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ( Studi Kasus *Laundry* Koem-Koem Surakarta)”. Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bagi konsumen pengguna jasa *laundry* Koem-Koem Surakarta masih kurang, karena pelaku usaha dan konsumen yang kurang memahami hak dan kewajiban masing-masing.<sup>66</sup> Persamaanya adalah membahas mengenai tanggung jawab pelaku usaha berdasarkan UUPK. Perbedaannya adalah taggung jawaab pelaku usaha yaang bukan hanya berdasarkan UUPK tetaapi juga dengan bagaimana tanggung jawab berdasarkan etika bisnis Islam.

---

<sup>65</sup> Iman Adri Fitriani, “Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru”, *Skripsi*, (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015). Dalam <http://repository.uin-suska.ac.id/7114/>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 Pukul 15.00 WIB

<sup>66</sup> Hernowo Bayu Wicaksono, “Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Luandry Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999( Studi Kasus *Laundry* Koem-Koem Surakarta)”, *Skripsi*:<http://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/47468/> Perlindungan-Hukum-Terhadap-Hak-Konsumen-Pengguna-Jasa-Laundry-Ditinjau-dari-Undang-Undang-Nomor-8-Tahun-1999-tentang-Perlindungan-Konsumen-Studi-Kasus-Laundry-Koem-Koem-Surakarta, diakses pada tanggal 27 Oktober 2019 pukul 15,22 WIB

### **BAB III**

## **LAPORAN PENELITIAN**

Lokasi penelitian menjadi hal yang utama dalam mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai data, oleh karena itu penelitian akan menjabarkan lokasi penelitian.

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Usaha *laundry* merupakan salah satu bidang usaha jasa yang semakin dibutuhkan. Jasa mencuci pakaian semakin memperoleh tempat karena orang-orang di perkotaan umumnya lebih memilih sesuatu yang bersifat praktis. Akibat terbatasnya lahan diperumahan dan anak kosan apabila mencuci pakaian sendiri mereka menjadi tidak leluasa untuk menjemur pakaian. Jasa *laundry* telah membantu sebagian besar orang yang sibuk dan tidak banyak mempunyai waktu luang untuk menyelesaikan pekerjaan khususnya dalam hal mencuci pakaian, akan tetapi tetap menginginkan penampilan bersih, rapih, wangi dan praktis. Peluang usaha jasa *laundry* berkembang di Indonesia termasuk di kota Bandar Lampung khususnya di daerah kecamatan Sukarame.

Berdasarkan data yang didapatkan dari penelitian usaha jasa *laundry* terdapat kurang lebih 10 tempat *laundry*, yang mana penulis mengambil 3(tiga) sampel atau contoh tempat *laundry* yang berada di sekitaran kampus UIN Raden Intan Lampung dengan radius 500 meter.



Data ini diambil dari observasi pada 1(satu) bulan terakhir pada bulan Agustus 2019 dan hanya mengambil 3 dari 10 *laundry* yang berada di sekitaran kampus UIN Raden Intan Lampung dengan radius 500 meter.

Berikut ini adalah gambaran umum 3 dari 10 tempat *laundry* yaitu sebagai berikut:

#### 1. Sofi *Laundry*

Sofi *Laundry* ini merupakan jasa *laundry* yang beralamatkan di Jalan Endro Suratmin No. 583 C Sukarame Bandar Lampung dan didirikan pada tahun 2013 yang sudah berjalan selama 6 tahun dan pada saat ini sudah memiliki 1 karyawan yang bekerja. Di Sofi *Laundry* ini belum memiliki sistem antar jemput pakaian dan buka pada hari senin sampai dengan hari minggu, dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 20.00 malam.

Pemilik Sofi *Laundry* ini memiliki ide membuka usaha jasa *laundry* ini dikarenakan adanya peluang usaha dan tempat yang strategis yang mana lokasi tempatnya berada tepat di depan jalan raya. Untuk jumlah konsumen yang datang rata-rata 10 orang/hari dan untuk sistem pencucian Sofi *Laundry* tidak hanya mencuci pakaian saja, akan tetapi juga terima jasa pencucian boneka, selimut, karpet dan seprei.

#### 2. Tila *Laundry*

Tila *Laundry* ini merupakan jasa *laundry* rumahan yang dibuka dan dikelola oleh pemilik *laundry* sendiri yaitu Ibu Yuniar, pada

awal mulanya dibuka tempat *laundry* ini dikarenakan melihat peluang usaha jasa *laundry* dan tempat yang strategis karena berada dekat dengan sekolah MAN 1 Sukarame dan kampus UIN Raden Intan Lampung.

Tempat *laundry* ini didirikan pada tahun 2004 yang beralamatkan di Jalan Pandawa Raya gang MAN 1 Korpri Jaya Bandar Lampung dan pada saat ini sudah berjalan sekitar 15 tahun, Tila *Laundry* adalah usaha jasa *laundry* yang pertama kali berdiri disekitar Jalan Pandawa Raya. Jasa usaha *laundry* ini tidak memiliki karyawan dikarenakan pemilik usaha mampu mengerjakannya sendiri. Selain memiliki usaha jasa *laundry* ini, beliau juga menjadi guru pengajar SBK (Seni Budaya dan Keterampilan) di sekolah Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Antasari Bandar Lampung.

Tila *Laundry* dibuka pada hari senin sampai dengan sabtu pada pukul 13.00 siang hingga 20.00 malam dikarenakan beliau memiliki kewajiban mengajar di sekolah Madrasah Ibtidaiyah dan khusus untuk hari minggu dibuka dari pukul 08.00 pagi hingga 20.00 malam. Tila *Laundry* pada saat ini mempunyai sistem antar jemput pakaian. Adapun jumlah konsumen perhari yaitu sekitar 10 sampai 15 orang/hari namun beliau saat ini menggunakan sistem bulanan karena beliau mempunyai kesibukan mengajar dan takut perkerjaan *laundry* nya terbengkalai.

### 3. Nabila *Laundry*

Nabila *Laundry* merupakan salah satu usaha jasa *laundry* yang memakai sistem dengan cara menyewa ruko dan pemilik usaha ini bernama Ibu Maryani Hasan. Nabila *Laundry* ini didirikan pada tahun 2018 yang beralamatkan di Jalan Pandawa 6, Korpri Jaya Bandar Lampung.

Ibu Maryani Hasan memiliki ide untuk membuka usaha jasa *Laundry* karena beliau bingung ingin membuka usaha apa sedangkan beliau hanya mengandalkan jasa yang beliau miliki sehingga muncullah ide untuk membuka usaha *laundry* yang diberi nama Nabila *Laundry*.

Pada saat ini Nabila *Laundry* hanya memiliki 1 (satu) orang karyawan yang bekerja dan Nabila *Laundry* ini dibuka pada setiap hari senin sampai dengan minggu pada pukul 08.00 pagi hingga pukul 21.00 malam.

Kelebihan yang dimiliki dari usaha jasa Nabila *Laundry* ini yakni sudah memiliki sistem antar jemput pakaian dengan menggunakan aplikasi Grab Online. Adapun jumlah konsumen setiap harinya yaitu kurang lebih 10 orang/hari. Usaha *laundry* Ibu Maryani Hasan tidak hanya menerima jasa cuci pakaian saja tetapi juga menerima cucian karpet, boneka, hordeng, tas dan sepatu.

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Laundry* di Sekitar UIN RIL**

Bahwasanya dalam UUPK terdapat 3(tiga) Pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 28 UUPK. Ketentuan yang pertama yaitu Pasal 19 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (1) UUPK kemudian menyatakan bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 19 ayat (3) UUPK lebih lanjut menyatakan bahwa pembelian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi dan Pasal 19 ayat (4) UUPK menyatakan bahwa pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan konsumen. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 19 UUPK tersebut mengisyaratkan bahwa terkadang kerugian memiliki kemungkinan disebabkan oleh kelalaian konsumen sendiri yang menyebabkan kerugian terhadap barang atau jasa miliknya tidak dapat

dimintai pertanggung jawaban terhadap barang atau jasa kepada pelaku usaha

Ketentuan dalam UUPK yang kedua mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yaitu Pasal 23 UUPK menyatakan bahwa usaha yang menolak dan/ atau tidak memberikan tanggapan dan/ atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUPK, dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan ke Badan Peradilan ditempat kedudukan konsumen

Ketentuan lanjutan yang relevan dan signifikan dengan Pasal 23 UUPK adalah rumusan Pasal 28 UUPK yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Rumusan pasal inilah yang kemudia dikenal dengan sistem pembuktian terbalik.

Rumusan Pasal 23 UUPK nampaknya muncul berdasarkan 2 (dua) pemikiran yaitu yang pertama, bahwa Pasal 19 menganut prinsip praduga tak bersalah. Prinsip ini yang berasumsi bahwa apabila pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian. Sebagai konsekuensi dari prinsip ini maka UUPK menerapkan batas waktu ganti kerugian 7 (tujuh) hari setelah transaksi. Dilihat dari konteks pasal 23 maka batas waktu 7 (tujuh) hari tidak dimaksudkan untuk menjalani proses pembuktian, akan tetapi hanya memberikan kesempatan kepada pelaku

usaha untuk membayar atau mencari penyelesaian lain, termasuk penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Observasi yang terdapat dilapangan memiliki deskripsi yang berbeda-beda di setiap tempat usaha jasa *laundry* dan pertanggung jawaban kepada konsumen.

Berbeda halnya dengan peristiwa yang terjadi pada Sofi *Laundry* menurut pemiliknya Ibu yang diwawancarai, bahwa informasi yang didapat pada Sofi *Laundry* pun pernah mendapatkan pengaduan dari konsumen kerana ketidakpuasan dalam hal penyetrikaan yang diterima konsumen. Jika ada pakaian yang tercampur dengan pakaian lainnya yang menyebabkan pakaian tersebut kelunturan pihak dari Sofi *Laundry* tidak bertanggung jawab karena dari kesepakatan awal sudah ditanyakan terlebih dahulu dari pihak Sofi *Laundry* ke pihak konsumen dan jika ada pakaian yang dapat menyebabkan luntur pada pakaian lainnya maka akan langsung dipisahkan dalam mencuci pakaian tersebut. Menurut salah satu konsumen yang bernama Popi Markuri bahwa ia berulang kali mencuci di Sofi *Laundry*, ia selalu ada keluhan karena barang yang di *laundry* sering tertukar dengan barang lainnya. Namun dari pihak Sofi *Laundry* bertanggung jawab atas tertukarnya barang tersebut dan mencarinya sampai barang tersebut ditemukan. Adapun jika ada barang yang hilang pemilik Sofi *Laundry* tidak memberikan solusi akan tetapi mencari solusi bersama-sama kepada pihak konsumen untuk mendapatkan bersama agar tidak memberatkan salah satu pihak.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada pemilik Tila *Laundry* yaitu Ibu Yuniar. Didapatkan informasi bahwa usaha *laundry* yang beliau dirikan sudah sangat lama. Adapun kendala yang dialami oleh Ibu Yuniar yaitu sering terjadinya kerusakan pada mesin yang digunakan untuk mencuci pakaian konsumen. Dalam hal penyetrikaan pakaian sering mendapatkan komplain dari konsumen karena dahulu Ibu Yuniar mempunyai 1(satu) orang karyawan yang mana dalam hal penyetrikaan dirasa kurang rapih, untuk hal itu Ibu Yuniar memutuskan untuk mengerjakannya sendiri agar tidak mendapatkan komplain dari pihak konsumen. Selain dalam hal penyetrikaan yang kurang rapi Tila *Laundry* juga pernah mendapatkan komplain tentang keterlambatan waktu penyelesaian pencucian tidak sesuai dengan perjanjian dikarenakan Ibu Yuniar juga memiliki kewajiban sebagai guru pengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Usaha *Laundry* milik Ibu Yuniar sudah menggunakan layanan antar jemput, walaupun ada kehilangan barang Ibu Yuniar selaku pemilik usaha *laundry* tidak bertanggung jawab atas kehilangan pakaian tersebut karena layanan antara yang mengantar dan menjemput pakaian tersebut sudah berbeda orang. Sebagai konsumenpun tidak komplain dikarenakan konsumen menyadari bahwa itu kesalahannya sendiri.

Dari hasil wawancara dengan pemilik Nabila *Laundry* yang bernama Ibu Maryani Hasan didapatkan informasi bahwa selama ini dalam menjalankan usaha Nabila *Laundry* ini, ada beberapa konsumen pernah mengadukan ketidak puasan layanan jasa Nabila *Laundry* milik konsumen



yang disebabkan pakaian hilang dan tertukar. Oleh karena itu jika pakaian tersebut hilang maka Ibu Maryani Hasan memberikan pertanggung jawaban berupa 10 kali pencucian secara gratis, sedangkan jika pakaian tersebut tertukar dengan pakaian konsumen lain, maka akan dicarikan dengan pakaian konsumen lain yang tertukar. Selain itu Ibu Maryani Hasan selaku pemilik usaha Nabila *Laundry* akan terus berupaya meningkatkan pelayanan konsumen agar hal tersebut tidak terulang kembali dan konsumen merasa puas dengan pelayanan dari Nabila *Laundry* miliknya.

Prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh para pelaku usaha jasa laundry ini penting demi 3 (tiga) hal yaitu: *pertama*, untuk diterapkan karena konsumen tidak dalam posisi yang menguntungkan untuk membuktikan bahwa adanya kesalahan dalam suatu proses produksi dan distribusi yang kompleks mengingat terbatasnya informasi dan kemampuan lainnya. *Kedua*, asumsi pelaku usaha lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atau kesalahan. *Ketiga*, asas ini dapat memaksa pelaku usaha untuk lebih berhati-hati.

## **BAB IV ANALISIS DATA**

### **A. Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Usaha *Laundry* di Sekitar Kampus UIN RIL**

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan.
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran; dan
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

Seperti yang diketahui bahwa Pasal 19 ini membicarakan tentang tanggung jawab pelaku usaha yang dimana pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Berikut adalah analisis data yang meliputi terkait tentang, wawancara, kendala yang di alami, keluhan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha *laundry*.

Berdasarkan hasil wawancara di Sofi *Laundry* yang peneliti lakukan dengan pemilik usaha *laundry* bahwasannya Sofi *Laundry* memiliki jumlah konsumen yang tidak sedikit, dan dalam satu bulan konsumen yang datang di Sofi *Laundry* berkisar 300 orang jadi untuk konsumen per harinya yang datang kurang lebihnya mencapai 8-10 orang/hari. Untuk jam kerja di Sofi *Laundry* yaitu sekitar 12 (dua belas) jam dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 20.00 malam dan dibuka setiap hari (senin-minggu). Di Sofi *Laundry* terdapat 2 (dua) jenis sistem pencucian yaitu dengan sistem satuan dan kiloan.

Adapun jenis pakaian yang di cuci secara satuan yaitu diantaranya: kaos, kemeja, batik, jas (1 stel), jas satuan, bed cover jumbo, bed cover kecil, dress panjang, dress pendek, selimut besar, selimut kecil, kebaya satuan, kebaya (1 stel), karpet, sprengi besar, sprengi kecil, gordeng, boneka. Dan untuk jenis pakaian yang dicuci secara kiloan yaitu diantaranya: atasan, bawahan, jaket, dress/ gamis, sarung, handuk.

Pada saat ini Sofi *Laundry* memiliki 1(satu) orang karyawan yang bekerja dan pemilik juga ikut membantu mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut agar bisa selesai tepat waktu dan tidak mengecewakan konsumen. Untuk sistem pembayaran pada Sofi *Laundry* dilakukan secara *cash* yaitu pertukaran antara uang dan barang.

Kendala yang terjadi di Sofi *Laundry* yaitu kurangnya tenaga kerja pada bagian penyetrikaan pakaian sehingga pemilik usaha *laundry* juga turut membantu dan menyelesaikan pekerjaan agar cepat selesai tepat waktu.

Keluhan konsumen yang terjadi di Sofi *Laundry* diantaranya ketidakpuasan dalam hal penyetrikaan yang dirasa kurang rapih oleh konsumen dan sering tertukarnya pakaian antara konsumen satu dengan konsumen lainnya.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut hasil wawancara dan penelitian di tempat usaha di Sofi *Laundry*, “segala bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen di Sofi *Laundry* telah diberlakukan dalam bentuk kesepakatan jika terjadi kehilangan barang akan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut” seperti yang dikatakan Ibu Sundari (pemilik usaha Sofi *Laundry*) saat diwawancarai.

Berdasarkan wawancara Nabila *Laundry* buka sekitar pukul 08.00 pagi sampai pukul 21.00 malam dan Nabila *Luandry* memiliki satu (1) orang karyawan, adapun jumlah konsumen yang datang di Nabila *Laundry* untuk setiap harinya tidak menentu akan tetapi jika di hitung setiap bulannya mencapai 300 (tiga ratus) orang/bulan. Di Nabila *Laundry* juga memiliki 2 sistem dalam pencucian *laundry* yaitu sistem satuan dan kiloan.

Adapun jenis cucian yang dapat di *laundry* berupa: pakaian, karpet, boneka, gordeng, tas, sepatu dan lain sebagainya. Dalam sistem pencucian *laundry* satuan yaitu: boneka, seprai besar, seprai kecil, selimut besar, selimut kecil, mukena, handuk, tas, sepatu, jeans, jaket, gordeng, karpet.

Adapun pencucian dalam sistem kiloan yaitu dalam bentuk pakaian seperti kaos, kemeja, celana, jilbab. Nabila *Laundry* juga mempunyai sistem pencucian *laundry* 1 hari selesai namun untuk harga yang satu hari selesai berbeda dengan harga yang biasanya, cenderung lebih mahal karena konsumen meminta lebih cepat selesai dibandingkan dengan yang harus menunggu tenggang waktu yang ditentukan.

Kendala yang dialami di Nabila *Laundry* yaitu kurangnya tenaga kerja karena untuk sekarang mencari tenaga kerja untuk usaha *laundry* lumayan sulit. Sehingga pemilik usahapun ikut serta dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Keluhan Konsumen Nabila *Laundry* sering mendapatkan konsumen yang mengeluh karena pernah terjadi kelunturan pakaian, tertukarnya barang antar konsumen serta pernah mengalami kehilangan barang milik konsumen. Adapun wawancara selanjutnya yaitu “jika ada kehilangan barang di Nabila *Laundry* yaitu akan digratiskan cuci selama 10 hari” seperti yang dikatakan oleh Ibu Maryani Hasan (pemilik usaha Nabila *laundry*) saat diwawancarai.

Berdasarkan hasil wawancara di Tila *Laundry* yang peneliti lakukan dengan pemilik *laundry* yaitu Ibu Yuniar bahwasannya Ibu Yuniar mengerjakan usaha *laundry* ini hanya sendiri tanpa ada karyawan dan beliau juga mempunyai kewajiban sebagai guru pengajar Seni Budaya dan Keterampilan disalah satu sekolah Madrasah Ibtidaiyah di wilayah Antasari. Tila *Laundry* juga memiliki pelanggan yang tidak sedikit, pelanggan yang

datang di Tila *Laundry* untuk setiap harinya kurang lebih mencapai 10 sampai 15 orang/harinya. Tetapi untuk yang sudah berlangganan lama dengan Tila *Laundry* mereka mengambil sistem bulanan, tetapi bagi yang belum berlangganan Tila *Laundry* juga masih menerima sistem harian. Tila *Laundry* buka untuk setiap hari senin sampai sabtu sekitar pukul 13.00 sampai 20.00 tetapi khusus untuk hari minggu Tila *Laundry* buka dari jam 08.00 sampai pukul 20.00.

Adapun kendala yang sering dialami pelaku usaha Tila *Laundry* yaitu dengan sering terjadi kerusakan pada mesin terutama pada bagian pengeringan pakaian, sehingga dapat menghambat pekerjaan pelaku usaha *laundry*.

Keluhan Konsumen Pernah terjadi konsumen yang mengeluh di Tila *Laundry* karena dalam hal penyetrakaan yang kurang rapi dan adapun yang mengeluh karena pakaian yang di *laundry* kelunturan dengan pakaian lainnya.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Untuk wawancara selanjutnya yaitu “jika ada keterlambatan dalam hal pencucian pakaian di Tila *Laundry* yaitu dengan meminta maaf terhadap konsumen secara lisan dan semaksimal mungkin akan diusahakan untuk tepat waktu” seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuniar (pemilik usaha Tila *laundry*) saat diwawancarai.

Dalam hal ini Implementasi Pasal 19 pelaku usaha Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa

*laundry* kurang maksimal dilakukan. Contohnya pada pelaku usaha Tila Laundry yang memiliki beberapa faktor yang menyebabkan implementasi belum maksimal yaitu pemilik usaha Tila laundry belum memiliki nota pengambilan barang *laundry*, belum adanya list harga dan jenis pakaian *laundry* per item maupun perkilogram. Adapun dalam segi pakaian kelunturan pakaian lain dan penyertikaan yang kurang rapi serta keterlambatan waktu pelaku usaha hanya meminta maaf kepada konsumen.

**B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Usaha Jasa Laundry di Sekitar Kampus UIN RIL**

Tanggung jawab adalah perbuatan dimana seseorang berani menanggung apa yang telah diucapkan dan dilakukan. Sikap tanggung jawab ini tentunya sangat penting bagi kehidupan didunia, baik dalam hal beribadah ataupun hubungan sosial. Tanpa adanya trasa tanggung jawab sudah pasti kehidupan akan berantakan.

Islam sendiri juga mengajarkan kita untuk mengutamakan sikap tanggung jawab. Hal ini terbukti dalam banyaknya ayat-ayat yang terdapat didalam Al-Qur'an yang membahas konsep tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab terhadap Sang Khalik, tanggung jawab terhadap orang tua, pasangan, dan sesama muslim lainnya.

Analisa pertanggung jawaban Pelaku Usaha Jasa menurut hukum Islam terdapat pada Al-Qur'an surat (Al-Mudatsir (74) ayat 38).

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾



Artinya: “*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”(Al-Mudatsir (74) ayat 38).

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai disisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar maupun yang taat, semua tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari kiamat, kecuali golongan kanan. Golongan kanan yang dimaksudkan adala orang-orang mukmin yang ikhlas, yang menerima buku amalan mereka dihari kiamat.Oleh karena itu, tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak *laundry* dan pengguna jasanya harus mempunyai pertanggungjawaban karena akan ditanyakan kelak dihari kiamat.

Transaksi yang dilakukan pihak *laundry* dengan jasa *laundry* dalam hukum Islam dapat dikatakan sebagai *ijarah* karena *ijarah* sendiri memiliki arti yaitu antaranya sebagai jual beli jasa yang mengandung manfaat. Dan yang dilakukan oleh pihak *laundry* dan konsumen yaitu memberi upah sebagai nilai dari manfaat jasanya yang diberikan oleh pelaku usaha jasa *laundry*, oleh karena itu transaksi yang dilakukan antara pihak *laundry* dengan konsumen ini dapat dilakukan sebagai *ijarah*.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang peneliti lakukan di pemilik usaha *laundry* sekitar kampus UIN Raden Intan Lampung radius 500 meter yaitu *laundry* Sofi, Nabila dan Tila. *Laundry* ini masih memiliki keunggulan dari jasa-jasa serupa yang juga menyelenggarakannya. Banyaknya konsumen yang menggunakan jasa *laundry* dikarenakan lebih praktis dan hemat serta tidak menyita waktu bagi mereka yang sibuk dengan urusan

mereka yang sibuk kuliah, pergi ke kantor dan lain sebagainya sehingga tidak mempunyai waktu untuk mencuci serta menyetrika pakaian yang akan dipergunakan.

Dengan masih banyaknya masyarakat yang memilih untuk menggunakan jasa *laundry* pihak *laundry* memiliki tanggung jawab yang tinggi untuk memelihara kepercayaan konsumen pengguna jasa *laundry*. Oleh karena itu disini pihak *laundry* memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap jasa yang diselenggarakannya dengan melindungi konsumen pengguna jasanya karena dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha.

Pemberian perlindungan kepada konsumen salah satunya adalah dengan menepati janji yang telah dikatakan oleh pihak pelaku usaha kepada pengguna jasa *laundry*, sebagaimana firman Allah potongan Al-Qur'an surat (Al-Nahl(16) ayat 91):

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ  
 جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya : “Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Al-Nahl(16) ayat 91):

Dalam ayat ini sudah jelas bahwasannya kita diperintahkan untuk menunaikan atau menepati janji yang telah kita buat. Hal ini serupa dengan apa yang dilakukan oleh pihak *laundry* dan penggunaan jasa *laundry*

sebelum melakukan pencucian pakaian ataupun barang yang akan dilaundry.

Adapun bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelaku usaha laundry adalah dengan pihak pelaku usaha laundry memberikan kesempatan pada konsumen yang melakukan komplain atau pihak laundry memberikan hak pada konsumen untuk mengatakan keluhannya.

Selain itu dalam hukum Islam khususnya ijarah dalam hal menjual jasa segala sesuatu yang dipekerjakan baik secara pribadi maupun kelompok mereka harus mempertanggungjawabkannya, ketika ada unsur kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang bekerja (pelaku usaha laundry), dalam sebuah ayat Al-Qur'an surat (An-Nahl ayat 93):



وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”. (An-Nahl ayat 93)

Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan suatu hal yang sangat penting dalam setiap transaksi. Dengan adanya tanggung jawab ini maka tidak akan ada hak-hak diantara mereka yang terbengkalai.

Dalam konsep *fiqh siyasah* khususnya *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* menyatakan bahwasannya seorang pemimpin harus mampu melaksanakan

tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang bos terhadap karyawannya, seperti tertera didalam Qs. Al-Mudatstsrir:38 yang artinya “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”, atas perbuatan buruk maupun perbuatan baiknya. Ganjaran bagi orang yang lalai dalam melakukan tanggung jawabnya maka perbuatan buruknya mengharuskan ia mendapatkan azab dan dibelenggu lehernya kecuali golongan kanan yairu golongan orang-orang yang tidak lalai dalam menunaikan kewajibannya, maka mereka termasuk orang-orang yang masuk dalam surga dan mendapatkan semua yang diinginkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai pembahasan tentang Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa *laundry* di sekitar kampus UIN RIL adalah pelaku usaha jasa *laundry* memiliki bentuk tanggung jawab yang yang berbeda-beda di antaranya:
  - a. Belum ada kejelasan tentang tanggung jawab terhadap konsumen.
  - b. Adapun jika ada pakaian yang kelunturan pemilik usaha *laundry* tidak bertanggung jawab.

Pada umumnya pelaku usaha *laundry* di sekitar kampus belum mempunyai tanggung jawab penuh, hal ini dikarenakan kurangnya karyawan, karyawan tidak memiliki tanggung jawab penuh, pemilik *laundry* juga belum berpengalaman. Dalam analisis hukum Islam, tanggung jawab pelaku usaha dalam hal ini pihak *laundry* jika ada pakaian milik konsumen yang hilang atau rusak maka pihak *laundry* wajib mengganti pakaian tersebut.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada usaha jasa *laundry*

disekitar kampus UIN RIL yaitu dalam konsep fiqh siyasah khususnya siyasah tanfidziyyah syar'iyah menyatakan bahwasannya seorang pemimpin harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang pimpinan usaha terhadap karyawannya, seperti tertera didalam Qs. Al-Mudatstsir: 38 yang artinya “tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”, atas perbuatan buruk maupun perbuatan baiknya.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut diatas, kiranya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha *laundry* seharusnya kepada yang melakukan kesalahan hingga menimbulkan kerugian bagi konsumen, seharusnya memberikan ganti kerugian berupa materil maupun non materil sehingga dapat memberi kepuasan bagi konsumen agar para pihak tidak ada yang merasa dirugikan serta konsumenpun tidak menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha.
2. Kepada pelaku usaha jasa *laundry* yang belum memiliki list harga pakaian *laundry* satuan maupun kiloan, diharapkan agar bisa menambahkan list harga pada nota *laundry* sehingga konsumen mengetahui daftar harga pada pelaku usaha jasa *laundry* tersebut.
3. Kepada konsumen atau pengguna jasa *laundry* agar lebih berhati-hati dalam memilih jasa *laundry*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-qur'anul Karim

#### A. Buku

Ahmad, Muhamad Al-Assal dan Fathi, Ahmad Abdul Karim, *Sistem dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terjemahan H. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al-Nabhani, Syekh Taqqiyudin, Al-Nizam Al-Islam , terjemahan. Abu Amin, *"Peraturan Hidup Dakam Islam"*, Bogor: Pustaka Thaqiul Izzah, 2001

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazdhab*, terjemahan H. Chabitul Umam & Abu Hurairah, Darul Ulum Press, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Fitrian, Iman Adri, " *Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Pekanbaru*", *Skripsi*, Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Haryono, *Sumber Hukum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Lamintang P.A.F, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1990.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Miru, Hamadi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: Malang Press, 2007.



Muhamad, Abdul KadIr, *Hukum Dan Penelitian*, Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.

Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nasution, A.Z., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta:Daya Widya,1999.

Noor, Juliyanasyah, *Metode Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2011.

Nugraha, Nanang, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry Di Kecamatan Sukasari Kota Bandung*”, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Riwayat Abu Dawud hadist no.1315, dan dinyatakan hasan oleh al-Albani dalam kitab Irwaul Ghalil hadist no.1315

Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: Manjar Maju, 2002.

Sholihin Bunyana, *Kaidah Hukum Islam*, Yogyakarta: Kreasi Total Media,2016.

Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta), STIM YKPN, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Syaifu Anam & Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2003.

Putri, Valeria Ayu Iko Riri Roman Bintaara,” *Pelaksanaan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Lundry terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999( Studi Kasus Usaha Laundry Di Sekitar Kampus Universitas Katolik Soegijapranata Semarang)*” skripsi, Semarang:Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, 2011.

Tika, Moh. Pabundu, *Metodologi riseach Bisnis* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

Wardi, Bahtiar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Logos cet-1, 1997.

Wicaksono, Hernowo Bayu, “*Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Luandry Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999( Studi Kasus Laundry Koem-Koem Surakarta)*”.

Yusuf, As-sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisni Ala Kapasitas*, Bogor, Al-Azhar Press, 2009.

Yusri, M, “Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam”. (On-line), dikutip dari :<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jphi/article/view/1302/1395>, diakses (14 Juli 2019).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

## **B. Jurnal**

Eka Nuraini Rahmawati & Ab mumin bin Ab Ghani, Akad Jual Beli Dalam Fikih Dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia, *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol.XII,No.4, Desember 2015

Melany, dk, Perancangan Industri Jasa Laundry di Surabaya Selatan, *Jurnal Widya Teknik*. Vol. 9 No.1, 2010.

Syamsul Hilal, Urgensi *Qawa'id Al-Fiqhiyyah* dalam pengembangan ekonomi Islam, *Jurnal Al- 'Adalah* Vol X No.1 Januari 2011

## **C. Undang- Undang**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## **D. Wawancara**

Sundari, wawancara dengan pemilik usaha Sofi *laundry*, Sukarame, Kamis, 7 November 2019.

Maryani Hasan, wawancara dengan pemilik usaha Nabilla *laundry* , Kamis, Sukarame, 7 November 2019.

Yuniar, wawancara dengan pemilik usaha Tila *laundry*, Sukarame, Sabtu, 9 November 2019

## **E. On-line**

Anwar, Muhammad, “Makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial”. (On-line), tersedia di: <http://www.academia.edu/734217/> Makalah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial, diakses (13 Juli 2019).